



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA)

TAHUN 2019

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 7/SKB-HK/2019
NOMOR : 170/SKB-21/DPRD/VIII/2019**

Tanggal : 8 Agustus 2019

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
Jabatan : Bupati Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi, Komplek Perkantoran
Kabupaten Kutai Kartanegara
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara.
2. a. Nama : SALEHUDDIN, S.Sos, S.Fil
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi
b. Nama : GUNTUR, S.Sos., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi
c. Nama : SUPRIYADI, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi
d. Nama : H. RUDIANSYAH, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati
bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya

dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

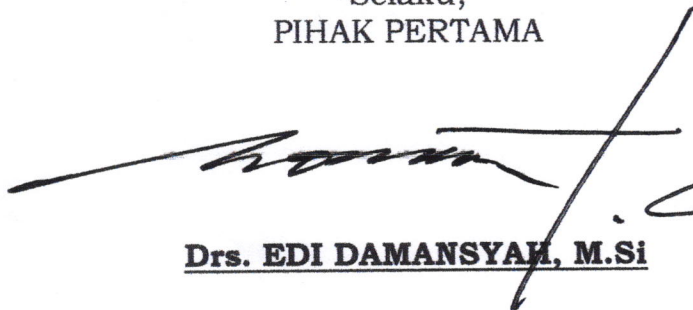
Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Tenggarong, 8 Agustus 2019

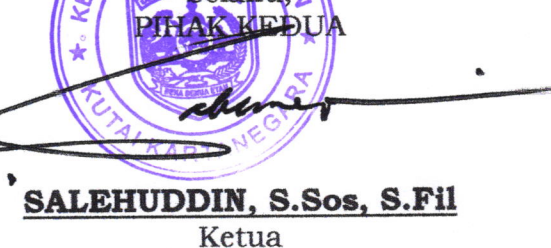
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Selaku,
PIHAK PERTAMA



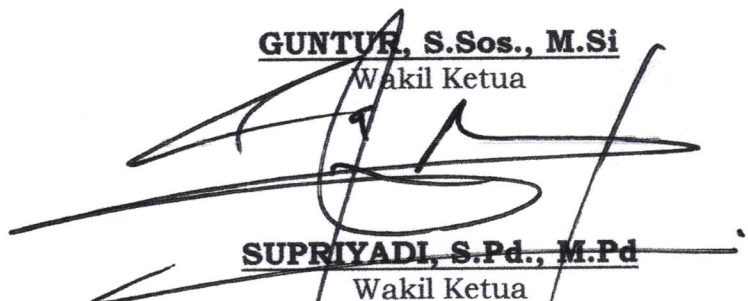
Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
Selaku,
PIHAK KEDUA



SALEHUDDIN, S.Sos, S.Fil
Ketua

GUNTUR, S.Sos., M.Si
Wakil Ketua



SUPRIYADI, S.Pd., M.Pd
Wakil Ketua

H. RUDIANSYAH, SH
Wakil Ketua

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) tahun 2019 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019. Perubahan dimaksud memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, RPKD Perubahan tahun 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan yang dijadikan sebagai bagian dari proses penyusunan APBD Perubahan tahun 2019.

Dalam pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah sampai dengan triwulan II pada tahun berjalan (2019), telah ditemukan berbagai kondisi yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2019. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan ke dua tahun 2019, antara lain sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) berdasarkan angka rencana dan realisasi hasil audit BPK berdasarkan realisasi APBD tahun anggaran 2018.
2. Hasil evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan APBD 2019, terdapat beberapa program dan kegiatan yang harus dilakukan penjabaran, penyesuaian, pergeseran kode belanja dan perubahan output dalam rangka penyesuaian terhadap prioritas dan kapasitas keuangan daerah.

Dengan adanya perubahan asumsi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan tersebut, maka diperlukan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) tahun 2019, sebagai bagian dari proses Perubahan APBD Kutai Kartanegara tahun anggaran 2019.

1.2 Tujuan penyusunan KUPA

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) adalah:

- a) Menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
- b) Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan Perubahan RKPD 2019 ;

- c) Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d) Memastikan bahwa proses pencapaian target prioritas pembangunan daerah dapat terlaksana;
- e) Sebagai dasar dalam penyusunan PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2019.

1.3 Dasar (hukum) penyusunan KUPA.

Dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 9) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
- 10) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara 2016-2021;
- 11) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 12) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019.

BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUPA)

Proses pembangunan daerah tidak terlepas dari optimalisasi belanja Pemerintah sebagai salah satu variabel pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, program dan kegiatan yang telah ditetapkan bersama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di dalam APBD Kutai Kartanegara tahun 2019. Namun demikian dalam perjalanannya terdapat beberapa asumsi dasar yang mengalami perubahan, terutama dari aspek sosial, ekonomi dan politik, yang berimplikasi pada kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, sehingga perlu dilakukan pencermatan APBD tahun berjalan sebagai proses evaluasi dan perbaikan, yang selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APBD Kutai Kartanegara 2019.

2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

a) Asumsi Dasar dan Pokok Pokok Perubahan APBD

Berdasarkan atas hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan APBD Kutai Kartanegara tahun 2019, inventarisasi kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan daerah, dan memperhatikan kebijakan-kebijakan provinsi dan nasional, maka disusun beberapa kebijakan yang mendasari perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan pembangunan Kutai Kartanegara tahun 2019, yakni :

- 1) Penyesuaian asumsi dasar perekonomian nasional dan daerah, yang berimplikasi pada asumsi pendapatan daerah;
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan dasar.
- 3) Perubahan dan pergeseran dalam rangka pemenuhan belanja wajib/mengikat dan belanja program prioritas;
- 4) Perubahan pembiayaan anggaran, dalam rangka pelaksanaan hasil audit laporan keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) oleh BPK tahun anggaran 2018 khususnya tentang ketetapan SiLPA;
- 5) Penyelesaian utang pihak ketiga;
- 6) Penyesuaian perhitungan pendapatan asli daerah; penyesuaian Gaji PNS; penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan operasional rutin SKPD dan kegiatan yang dipandang urgent serta efisiensi anggaran;

Secara umum asumsi dasar perubahan-perubahan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) *ekonomi makro*, Merupakan kecenderungan perkembangan perekonomian daerah yang didasari atas kondisi riil, kebijakan nasional yang berpengaruh kuat pada perekonomian daerah.

Kinerja perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan trend laju pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir cenderung fluktuatif. Kinerja perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat dari 3 (tiga) pendekatan, yakni: Dengan Migas, Tanpa Migas; dan Tanpa Migas dan Batu Bara.

Tahun 2018 harga batu bara acuan (HBA) kembali mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada Agustus 2018 saja, HBA tercatat pada level USD 107,83 per metrik ton, meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar USD 104,65 per metrik ton. Sehingga semakin memasuki pengujung tahun biasanya akan semakin naik.

Sebagai wilayah yang mengandalkan komoditas ekspor primer, kinerja perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sangat dipengaruhi oleh komoditas migas dan batubara. Keadaan tersebut secara langsung memberikan dampak terhadap perekonomian pada tahun 2018. PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara atas dasar harga berlaku Pada tahun 2018 sebesar Rp 167,01 triliun, dan apabila komoditas Migas dikeluarkan (PDRB Tanpa Migas) sebesar Rp 116,03 triliun. Selanjutnya perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, dimana besaran PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dengan migas pada tahun 2018 sebesar Rp 120,49 triliun, adapun Tanpa Migas PDRB sebesar Rp 77,90 triliun.

Tabel 2.1

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku
Dalam Tiga Tahun Terakhir 2016-2018** (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2016 ⁽¹⁾	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16.781.700,1	19.202.328,9	21.848.958,9
	a. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	10.890.078,6	12.792.687,6	14.519.529,1
	b. Kehutanan dan Penebangan Kayu	1.930.084,6	1.879.626,3	2.275.674,7
	c. Perikanan	3.961.536,9	4.530.015,0	5.053.755,2
2	Pertambangan dan Penggalian	82.395.699,9	97.052.499,1	110.567.417,4
	a. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	41.841.100,0	45.130.503,6	50.980.861,0
	b. Pertambangan Batubara dan Lignit	37.048.267,5	47.914.851,9	54.988.508,5
	c. Pertambangan Bijih Logam	227.421,0	246.249,8	305.552,4
	d. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	3.278.911,4	3.760.893,8	4.292.495,5
3	Industri Pengolahan	5.201.226,5	6.132.060,1	7.107.240,8
4	Pengadaan Listrik dan Gas	51.657,3	66.671,7	56.694,3
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	42.020,8	47.135,6	53.084,1
6	Konstruksi	10.207.440,4	11.120.171,7	10.859.536,7
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.676.949,5	5.282.409,4	5.882.319,4
8	Transportasi dan Pergudangan	1.302.853,6	1.424.549,0	1.555.878,9
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	350.871,1	408.119,4	442.521,7
	a. Penyediaan Akomodasi	57.805,4	63.625,1	65.663,3
	b. Penyediaan Makan Minum	293.065,7	344.494,2	376.858,4
10	Informasi dan Komunikasi	874.655,1	968.156,7	1.100.612,6

No	Lapangan Usaha	2016 ⁽¹⁾	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	406.960,3	433.835,5	545.265,0
12	Real Estate	708.038,3	790.614,1	905.905,8
13	Jasa Perusahaan	42.065,9	45.666,5	52.139,0
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.338.292,2	2.413.001,1	2.994.936,7
15	Jasa Pendidikan	1.436.503,8	1.711.725,0	1.832.989,4
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	803.479,3	916.349,9	871.905,4
17	Jasa lainnya	268.728,7	321.665,7	340.509,5
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		127.889.142,8	148.336.959,5	167.017.915,7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		86.048.042,8	103.206.455,9	116.037.054,7

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

Besaran PDRB ADHB menurut kategori, pada tahun 2018 dimana kategori Pertambangan dan Penggalian merupakan katagori yang memberi andil terbesar Rp 110,56 triliun, dengan sumbangan sub kategori Minyak, Gas dan Panas Bumi sebesar Rp 50,98 triliun. Selanjutnya kategori Pertanian sebesar Rp 21,84 triliun, Konstruksi sebesar 10,85 triliun, Industri Pengolahan sebesar 7,10 triliun, Perdagangan besar dan eceran sebesar 5,88 triliun, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib sebesar 2,94 triliun serta Jasa Pendidikan sebesar 1,83 triliun, Transportasi dan Pergudangan sebesar 1,55 triliun. Sedangkan nilai tambah bruto (NTB) yang dihasilkan katagori lainnya masih di bawah Rp 1 triliun.

Tabel 2.2

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2016-2018** (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2016 ⁽¹⁾	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.935.702,6	11.539.660,2	12.298.452,3
	a. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	6.472.296,2	6.983.480,4	7.541.689,0
	b. Kehutanan dan Penebangan Kayu	1.427.387,8	1.312.130,6	1.332.421,8
	c. Perikanan	3.036.018,5	3.244.049,2	3.424.341,5
B	Pertambangan dan Penggalian	86.259.982,7	86.272.313,5	86.917.060,1
	a. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	44.447.376,1	42.822.322,7	42.589.918,5
	b. Pertambangan Batubara dan Lignit	38.991.282,6	40.554.224,3	41.400.358,7
	c. Pertambangan Bijih Logam	167.339,1	157.905,8	156.448,7
	d. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	2.653.984,9	2.737.860,7	2.770.334,1
C	Industri Pengolahan	3.755.514,4	3.914.894,1	4.081.926,0

No	Lapangan Usaha	2016 ⁽¹⁾	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	50.445,9	57.296,9	56.116,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	35.847,2	38.877,3	37.528,7
F	Konstruksi	6.280.685,6	6.519.138,1	6.733.265,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.459.209,7	3.657.007,5	3.669.549,2
H	Transportasi dan Pergudangan	967.151,3	1.027.750,5	1.053.042,0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	239.407,5	268.665,0	271.902,3
	a. Penyediaan Akomodasi	38.784,9	39.858,2	41.031,2
	b. Penyediaan Makan Minum	200.622,6	228.806,7	230.871,1
J	Informasi dan Komunikasi	752.887,4	820.843,0	913.377,1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	303.751,7	315.893,0	317.136,0
L	Real Estate	533.226,7	539.475,1	548.942,3
M,N	Jasa Perusahaan	30.201,2	30.972,8	32.335,9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.620.682,9	1.595.801,7	1.639.524,1
P	Jasa Pendidikan	958.583,4	1.073.298,7	1.040.930,2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	617.472,9	675.843,5	659.910,3
R,S,T ,U	Jasa lainnya	201.870,7	222.977,2	221.668,0
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		117.070.579,5	118.663.242,4	120.495.451,0
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		72.623.203,4	75.840.919,7	77.905.532,5

Struktur perekonomian Kutai Kartanegara menurut lapangan usaha diproyeksikan tahun 2019 masih didominasi oleh 4 lapangan usaha utama yaitu Pertambangan dan Penggalian dengan peranan sebesar 65,4 persen dimana 32,3 persen disumbang dari batubara, dan 30,4 persen dari migas, pertanian 12,9 persen, Konstruksi sebesar 7,5 persen, Industri Pengolahan sebesar 4,1 persen, dan perdagangan 3,6 persen.

Proyeksi laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Triwulan I tumbuh sekitar 5 persen, dan ada pertumbuhan ekonomi 2019, setelah melihat tingginya pertumbuhan pada triwulan pertama. Dimana produksi batubara cukup tinggi, perkembangan Real Estate juga meningkat. Lapangan usaha listrik dan air juga meningkat. Serta sektor pertanian yang meningkat di triwulan I 2019.

Adanya kebijakan pemangkasan produksi minyak dunia oleh OPEC hingga Maret 2020 memberikan dampak terhadap kenaikan harga minyak dunia dan akan memberikan dampak langsung terhadap Produk Domestik Bruto Kutai Kartanegara dari Pertambangan Minyak. Pada bulan Januari-Juni 2019 harga minyak dunia mencapai kisaran US \$ 55 – US\$ 66. Sementara harga Gas alam berada pada posisi yang aman pada kisaran US\$ 2,45 per mmbtu sampai US\$ 2,55 per mmbtu.

Namun diprediksi Semester II 2019 mengalami penurunan Karena harga batubara semester I 2019 Trendnya terus mengalami penurunan dikisaran 80-90 US dolar/Ton. Bahkan HBA Juli saja turun hingga 11 persen dengan hanya mencapai kisaran 70 US Dollar/Ton. Hal ini disebabkan masalah perang dagang China Amerika dan pembatasan impor China dan India.

2) Pendapatan,

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Perubahan kebijakan pendapatan daerah pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019 disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi realisasi pendapatan daerah sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam perspektif perencanaan pembangunan daerah, salah satu instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah (government expenditure), dan sebaliknya kecenderungan pergerakan kinerja perekonomian daerah mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah. Sebagai daerah dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, maka kerangka keuangan daerah saat ini masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil pertambangan dan penggalian khususnya komoditas minyak dan gas bumi serta batu bara. Untuk perubahan APBD tahun 2019 Dana Perimbangan mengalami penurunan pada komponen Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar minus Rp. 266,936,762,024.11. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 tahun 2019 tentang Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2019 Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, yang memberikan tambahan alokasi dana transfer yang dapat digunakan pada tahun 2019.

Seiring dengan hal tersebut sumber pendapatan yang mengalami kenaikan adalah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 91,813,179,590.18, atau naik 12.70% hal ini salah satunya dikarenakan trend kinerja perekonomian daerah dalam tahun 2018 cenderung membaik dan untuk tahun 2019 diperkirakan akan terus menunjukkan trend positif. Berikut perubahan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019.

Tabel 2.1. Alokasi Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Tahun Anggaran 2019 dan Perubahan APBD Tahun 2019

NO.	URAIAN	TAHUN 2019			%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	377,030,636,809.00	386,133,880,026.20	9,103,243,217.20	2.41
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	60,252,455,223.50	60,252,455,223.50	0	0.00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12,192,593,272.59	6,387,318,562.00	-5,805,274,710.59	-47.61
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	37,050,000,000.00	34,120,806,627.81	-2,929,193,372.19	-7.91
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	267,535,588,312.91	285,373,299,612.89	17,837,711,299.98	6.67
4.2	DANA PERIMBANGAN	3,902,216,735,642.00	3,625,310,474,708.03	-266,936,762,024.11	-6.84
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	3,185,887,819,230.00	2,918,951,057,205.89	-266,936,762,024.11	-8.38
4.2.2	Dana Alokasi Umum	307,135,946,000.00	307,135,946,000.00	-	0.00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	409,192,970,412.00	409,192,970,412.00	-	0.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	723,063,774,000.00	814,876,953,590.18	91,813,179,590.18	12.70
4.3.1	Pendapatan Hibah	95,084,200,000.00	95,084,200,000.00	-	0.00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	343,032,800,000.00	434,845,979,590.18	91,813,179,590.18	26.77
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	185,361,774,000.00	185,361,774,000.00	0.00	0.00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	99,585,000,000.00	99,585,000,000.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	5,002,311,146,451.00	4,836,290,807,234.27	-166,020,339,216.73	-3.32

1. Pendapatan pada pos Dana Perimbangan, dari pagu pada APBD Murni sebesar Rp. 3,902,216,735,642.00 secara akumulasi mengalami penurunan sebesar minus Rp.266,936,762,024.11 atau -6,84 % sehingga asumsi pendapatan dari Pos Dana Perimbangan pada Perubahan APBD menjadi Rp. 3,635,279,973,617.89 Dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pos Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dari alokasi awal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 dan PMK No.77/PMK.07/2019 Tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2019, pada APBD 2019 yang semula Rp. 3,185,887,819,230.00 menjadi Rp. 2,918,951,057,205.89.
 - b. Pada Pos Dana Alokasi Umum, diasumsikan tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp. 307,135,946,000.00

- c. Untuk Pos Dana Alokasi Khusus diasumsikan sama dengan Alokasi awal APBD tahun 2019 sebesar Rp. 409,192,970,412.00.

Tabel 2.2. Alokasi dana Perimbangan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dan Perubahan 2019

URAIAN	APBD 2019	APBD-P 2019	SELISIH
DANA PERIMBANGAN	3,902,216,735,642.00	3,635,279,973,617.89	-266,936,762,024.11
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	3,185,887,819,230.00	2,918,951,057,205.89	-266,936,762,024.11
Dana Alokasi Umum	307,135,946,000.00	307,135,946,000.00	0.00
Dana Alokasi Khusus	409,192,970,412.00	409,192,970,412.00	0.00

2. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terdiri dari pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, secara akumulasi mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 91,813,179,590.18 dari alokasi sebelumnya sebesar Rp. 723,063,774,000.00. menjadi sebesar Rp. 814,876,953,590.18.

Tabel 2.3. Alokasi dana Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2019 dan Perubahan APBD 2019

URAIAN	APBD 2019	APBD-P 2019	SELISIH
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	723,063,774,000.00	814,876,953,590.18	0.00
Pendapatan Hibah	95,084,200,000.00	95,084,200,000.00	0.00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	343,032,800,000.00	434,845,979,590.18	91,813,179,590.18
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	185,361,774,000.00	185,361,774,000.00	0.00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	99,585,000,000.00	99,585,000,000.00	0.00

3) Belanja, merupakan alokasi belanja daerah, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan

yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Total Belanja Perubahan APBD Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 5.381.290.384.202,70 jika dibandingkan dengan anggaran pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 5,105,955,650,300.33 maka meningkat sebesar 5,39% atau naik sebesar Rp. 275.334.733.902,37

Belanja Tidak Langsung dialokasikan sebesar **Rp. 2.478.999.153.932,07** menurun sebesar minus -1.28 % atau **Rp.20,535,214,267.99** dari APBD Tahun 2019

Kebijakan Belanja Tidak Langsung :

1. Belanja Pegawai naik sebesar Rp. 36.536.282.026,92 dari APBD 2019 menjadi Rp. 1.859.833.499.997,92.00 kenaikan merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Komponen belanja Tunjangan Profesi Guru dan belanja Tambahan Penghasilan Guru.
2. Belanja Hibah mengalami perubahan atau kenaikan sebesar Rp. 21,190,484,565.60 dari APBD murni 2019, kenaikan pada Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi dan komponen belanja Dana hibah pendidikan yang merupakan silpa dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
3. Belanja Bantuan Sosial mengalami kenaikan pada Bansos Yang Tidak Direncanakan dan Santunan Korban Bencana Kebakaran, secara akumulasi total kenaikan sebesar Rp. 6.649.500.000,00
4. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik mengalami penurunan sebesar -14.63% atau menurun sebesar minus **Rp. 93.656.237.410,45**, sehingga menjadi **Rp. 546.437.569.368,55**. Hal ini disebabkan karena penyesuaian terhadap alokasi Bantuan Keuangan Desa.
5. Bantuan Keuangan Provinsi untuk sementara dialokasikan sesuai dengan APBD 2019, dan ditetapkan kemudian berdasarkan penetapan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Timur.
6. Belanja Tidak Terduga dialokasikan sama dengan APBD 2019 yaitu sebesar **Rp. 5.000.000.000,00**

Kebijakan Belanja Langsung :

1. Melakukan pergeseran/penambahan/pengurangan alokasi belanja program/kegiatan yang disesuaikan dengan pencapaian target program/kegiatan berdasarkan atas prioritas dan kapasitas keuangan daerah.
2. Alokasi Belanja Langsung mengalami peningkatan sebesar 11,85% atau bertambah sebesar **Rp. 307.526.704.720,30**, sehingga menjadi **Rp. 2.902.291.230.270,63**, semula sebesar **Rp.2,594,764,525,550.33**
Peningkatan tersebut dialokasikan untuk :
 - a. Pemenuhan belanja wajib/mengikat yang belum terakomodasi dalam APBD 2019;

- b. Pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga/pembayaran hutang kegiatan tahun 2018;
 - c. Pemenuhan belanja program-program strategis dan prioritas yang harus dialokasikan pada perubahan APBD 2019.
- 4) **Pembiayaan**, merupakan kondisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, yang perlu dibayar kembali dan/atau yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan Daerah, berdasarkan atas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat perbedaan proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), yang ditetapkan sebesar Rp. 574.499.576.968,43, dengan tidak mengoptimalkan SiLPA DBH-DR yang disebabkan terbatasnya waktu pelaksanaan pada masa sisa tahun anggaran.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah, mengalami kenaikan dari APBD murni 2019 untuk penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mahakan sebesar Rp.25.000.000.000,00 dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mahakam guna pencapaian target peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan cakupan layanan air bersih di wilayah Kabuapten Kutai Kartanegara

Berikut perubahan pembiayaan tahun 2019 :

Tabel 2.4. Perubahan Asumsi Pembiayaan Tahun 2019

NO	URAIAN	TAHUN 2019			%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	108,144,503,849.33	574.499.576.968,43	466.355.073.119,10	431,23
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	108,144,503,849.33	574.499.576.968,43	466.355.073.119,10	431,23
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0.00	0
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0.00	0
6.1.7	Penerimaan atas Investasi Non Permanen	0	0	0.00	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4,500,000,000.00	29,500,000,000.00	25,000,000,000.00	555.56
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4,500,000,000.00	29,500,000,000.00	25,000,000,000.00	555.56
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0.00	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	103,644,503,849.33	544.999.576.968,43	441.355.073.119,10	425,84

b) Struktur Perubahan APBD tahun 2019

Berdasarkan atas asumsi perubahan APBD Kutai Kartanegara maka berikut struktur APBD Perubahan tahun 2019 :

Tabel 2.5. Struktur APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019

KODE	URAIAN	APBD 2019	PERUBAHAN APBD 2019	TAMBAH/ KURANG	%
	PENDAPATAN	5.002.311.146.451,00	4.836.290.807.234,27	-166.020.339.216,73	-3,32%
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	377.030.636.809,00	386.133.880.026,20	9.103.243.217,20	2,41%
4 . 1 . 1	Pajak Daerah	60.252.455.223,50	60.252.455.223,50	0	0,00%
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	12.192.593.272,59	6.387.318.562,00	- 5.805.274.710,59	-47,61%
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	37.050.000.000,00	34.120.806.627,81	- 2.929.193.372,19	-7,91%
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	267.535.588.312,91	285.373.299.612,89	17.837.711.299,98	6,67%
4 . 2	DANA PERIMBANGAN	3.902.216.735.642,00	3.635.279.973.617,89	-266.936.762.024,11	-6,84%
4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	3.185.887.819.230,00	2.918.951.057.205,89	- 266.936.762.024,11	-8,38%
4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	307.135.946.000,00	307.135.946.000,00	-	0,00%
4 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	409.192.970.412,00	409.192.970.412,00	-	0,00%
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	723.063.774.000,00	814.876.953.590,18	91.813.179.590,18	12,70%
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	95.084.200.000,00	95.084.200.000,00	-	0,00%
4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	343.032.800.000,00	434.845.979.590,18	91.813.179.590,18	26,77%
4 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	185.361.774.000,00	185.361.774.000,00	-	0,00%
4 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	99.585.000.000,00	99.585.000.000,00	-	0,00%
5 .	BELANJA	5.105.955.650.300,33	5.381.290.384.202,70	275.334.733.902,37	5,39%
5 . 1 .	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.511.191.124.750,00	2.478.999.153.932,07	-32.191.970.817,93	-1,28%
5 . 1 . 1 .	Belanja Pegawai	1.823.297.217.971,00	1.859.833.499.997,92	36.536.282.026,92	2,00%
	Gaji dan Tunjangan	1.103.397.928.503,67	1.087.228.370.817,59	- 16.169.557.686,08	-1,47%
	Insentif Daerah	402.438.916.467,33	402.438.916.467,33	-	0,00%
	Uang Makan	90.194.352.000,00	90.194.352.000,00	-	0,00%
	Tunjangan Profesi Guru	196.579.724.000,00	248.039.189.318,00	51.459.465.318,00	26,18%
	Tunjangan Khusus Guru	27.428.297.000,00	27.428.297.000,00	-	0,00%
	Tambahan Penghasilan Guru	3.258.000.000,00	4.504.374.395,00	1.246.374.395,00	38,26%
5 . 1 . 4 .	Belanja Hibah	39.888.100.000,00	61.078.584.565,60	21.190.484.565,60	53,12%
	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi	5.900.000.000,00	20.616.695.000,00	14.716.695.000,00	249,44%
	Belanja Hibah Kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat	4.050.000.000,00	4.050.000.000,00	-	0,00%
	Belanja Hibah Dana Pendidikan	29.938.100.000,00	36.411.889.565,60	6.473.789.565,60	21,62%
5 . 1 . 5 .	Belanja Bantuan Sosial	2.912.000.000,00	6.649.500.000,00	3.737.500.000,00	128,35%
	Santunan Veteran	1.512.000.000,00	1.512.000.000,00	-	0,00%
	Santunan Korban Bencana Kebakaran	-	1.214.500.000,00	-	-
	Belanja Bantuan Sosial Individu dan/atau Keluarga Berkecukupan	-	1.323.000.000,00	-	-

KODE	URAIAN	APBD 2019	PERUBAHAN APBD 2019	TAMBAH/ KURANG	%
	Bansos Yang Tidak Direncanakan	1.400.000.000,00	2.600.000.000,00		0,00%
5 . 1 . 7 .	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	640.093.806.779,00	546.437.569.368,55	- 93.656.237.410,45	-14,63%
	Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa (ADD)	328.922.175.179,00	340.415.631.078,55	11.493.455.899,55	3,49%
	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa	124.672.700.000,00	16.940.000.000,00	- 107.732.700.000,00	-86,41%
	Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa Serentak		988.700.000,00	988.700.000,00	
	Dana Desa	185.361.774.000,00	186.887.022.600,00	1.525.248.600,00	0,82%
	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.137.157.600,00	1.206.215.690,00	69.058.090,00	6,07%
5 . 1 . 8 .	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	0,00%
				-	
5 . 2 .	BELANJA LANGSUNG	2.594.764.525.550,33	2.902.291.230.270,63	307.526.704.720,30	11,85%
	SURPLUS / (DEFISIT)	-103.644.503.849,33	-544.999.576.968,43	-441.355.073.119,10	425,84%
				-	
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	108.144.503.849,33	574.499.576.968,43	466.355.073.119,10	431,23%
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	108.144.503.849,33	574.499.576.968,43	466.355.073.119,10	431,23%
6 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	
6 . 1 . 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	
6 . 1 . 7	Penerimaan atas Investasi Non Permanen	-	-	-	
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.500.000.000,00	29.500.000.000,00	25.000.000.000,00	555,56%
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.500.000.000,00	29.500.000.000,00	25.000.000.000,00	555,56%
6 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	103.644.503.849,33	544.999.576.968,43	441.355.073.119,10	425,84%

BAB III PENUTUP

Dengan disusunnya Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) tahun 2019, yang diikuti penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun 2019, maka proses penyusunan Perubahan APBD tahun 2019 mengacu pada dokumen KUPA dan PPAS Perubahan yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Bupati Kutai Kartanegara dengan DPRD Kutai Kartanegara.

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD ini dibuat untuk menjadi bagian dari proses Perubahan APBD Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019.

Tenggarong, 8 Agustus 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



EDI DAMANSYAH